

ANALISIS PERENCANAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA PEMERINTAHAN KAB. PESISIR BARAT

Khairudin¹, Haichal Badry²

^{1,2}Universitas Bandar Lampung

Email : haichal.21011151@student.ubl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30606/mmebhk53>

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Pemerihan, serta menilai kesesuaian antara perencanaan keuangan desa dengan mengevaluasi efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Metodologi yang digunakan mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan dan studi kasus di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang melibatkan partisipasi publik dan transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, masih ada tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi dana desa. Mayoritas kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan oleh perangkat Desa Pemerihan. Meskipun demikian, persentase pencapaian target pembangunan infrastruktur belum optimal, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perencanaan Keuangan Desa. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi selama proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Pemerihan, Kecamatan Bengkuntat, Kabupaten Pesisir Barat. Artikel ini membahas analisis perencanaan dana desa sebagai instrumen penting dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi perangkat desa Pemerihan untuk pelaksanaan program lanjutan di tahun berikutnya, dengan harapan dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditentukan.

Kata Kunci :Perencanaan Keuangan Dana Desa

ABSTRACT. This study aims to understand the planning process for village fund management in 2023 in Pemerihan Village, as well as assess the suitability between village financial planning and evaluating the effectiveness of the use of village funds in supporting sustainable development goals. The methodology used includes qualitative and quantitative analysis, including interviews with stakeholders and case studies in several villages. The results of the study show that planning involving public participation and transparency can increase accountability and have a positive impact on people's welfare. However, there are still challenges in the management and utilization of funds that need to be overcome to maximize the potential of village funds. The majority of activities have been carried out in accordance with the initial plan set by the Village apparatus. However, the percentage of achievement of infrastructure development targets has not been optimal, in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning the Management of Village Financial Planning. This study also identifies the challenges and obstacles faced during the planning process of village fund management in Pemerihan Village, Bengkuntat District, West Coast Regency. This article discusses the analysis of village fund planning as an important instrument in community development and empowerment at the village level. This research shows that there is a need for improvement in accordance with the program plan that has been set. This is an evaluation material for the Pemerihan village apparatus for the implementation of follow-up programs in the following year, with the hope of achieving or even exceeding the predetermined targets.

Keyword: *Village Fund Financial Planning*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, yang menjadi dasar hukum utama untuk pengelolaan desa di Indonesia. Undang-undang ini diterbitkan dengan tujuan untuk (1) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa; (2) Mengatasi kemiskinan; dan (3) Mendukung pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan yang berbasis pada potensi lokal, sehingga dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata di Indonesia. Salah satu elemen penting dalam pengelolaan desa untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan desa adalah proses memperkirakan jumlah pendapatan dan belanja desa untuk periode tertentu di masa depan. Penyusunan perencanaan keuangan desa sangat krusial karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Wulandari & Sutjiati, 2014) serta menjaga keharmonisan organisasi (Ranti Nurdiansari, 2020). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, fenomena yang terjadi di Desa Pemerihan, Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan keuangan desa didominasi oleh pengelola, dengan keterlibatan masyarakat yang sangat minim dalam rapat pembahasan perencanaan keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas.

Penelitian mengenai perencanaan keuangan desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang bervariasi. Pranata et al. (2024) menemukan bahwa pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan keuangan dana desa di Desa Pardasuka, Kecamatan Ngaras, belum berjalan dengan baik. Sebaliknya, (Triani & Handayani, 2018) menemukan bahwa perencanaan keuangan dana desa di Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren di Jawa Timur sudah optimal. (Yusuf et al., 2019) melaporkan bahwa perencanaan keuangan di Desa Dulamayo Barat, Pilohayanga, dan Pilohayanga Barat di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, belum optimal. (Monalisa Siagian et al., 2024) menemukan bahwa perencanaan keuangan di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, sudah optimal. (Fatmasari & Adi, 2021) juga menemukan perencanaan keuangan di Desa Sepakung sudah optimal. Namun, □(Novitasari YE et al., 2022) □(Syafa Abhinaya Putri et al., 2024)□menemukan bahwa perencanaan keuangan di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, belum optimal. (Elnis Gulo & Molinda Kakisina, 2023)□ melaporkan bahwa perencanaan keuangan di Desa Simaeasi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, juga belum optimal.

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya dalam hal objek yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah Desa Pemerihan di Kabupaten Pesisir Barat, yang belum pernah menjadi subjek penelitian dengan topik serupa. Desa Pemerihan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu desa penerima dana desa yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam perencanaan keuangannya. Selain itu, desa ini memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang belum dikelola dengan baik, sehingga diperlukan perencanaan keuangan yang efektif untuk mendorong pembangunan desa. Karakteristik desa pesisir juga menambah kompleksitas dalam proses perencanaan keuangan, mengingat adanya kebutuhan khusus terkait pengembangan wilayah pesisir dan ketergantungan sebagian besar masyarakat pada sektor kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perencanaan keuangan di Desa Pemerihan, Kabupaten Pesisir Barat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai efektivitas perencanaan keuangan dana desa, khususnya di daerah tersebut.

Literatur Rview

Dana Desa

Menurut Permendes No 16 Th 2018, mengenai pengelolaan Dana Desa, pasal (1) ayat (2), Dana Desa diartikan sebagai dana yg berasal pd Anggaran Pemasukan & belanja Negara, yang dialokasikan untuk desa lewat budget penghasil an & belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana ini dipakai utk men danai kegiatan pemerintahan, pembangun an, pembinaan masyarakat, & pemberdaya an masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberi manfaat maksimal pada masyarakat desa, termasuk kemajuan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan kenaikan pelayan an warga di level desa. Lili (2018) menyatakan bahwa dana desa adalah dana yng di setujuii tiap tahun oleh desa dari APBN, yg dialokasikan secara langsung melalui APBD Kabupaten/Kota utk men danai berbagai kegiatan penyelenggaran pemerintah an, konstruksi desa, serta peningkat an masyarakat desa. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di tingkat pemerintah kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati. Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus pemberdayaan masyarakat desa, Kecamatan dan Inspektorat Kabupaten (Susanti et al., 2020).

Dana desa disalurkan dalam tiga tahap untuk setiap desa. Tahap I dilakukan paling cepat pada bulan April dengan alokasi sebesar 40%, Tahap II paling lambat pada bulan Agustus juga sebesar 40%, dan Tahap III pada bulan

November atau lebih lambat lagi dengan alokasi sebesar 20% dari total dana desa yang telah ditentukan untuk masing-masing desa.

Perencanaan Keuangan

Sistematis dalam mengelola uang dan sumber daya keuangan untuk mencapai berbagai sasaran finansial, ber manfaat untuk waktu yang singkat, menengah, hingga panjang. Menurut Pendit dan Sumaryadi (2018), perencanaan keuangan meliputi pemilihan tujuan finansial, penilaian terhadap sumber daya keuangan yang ada, pemilihan strategi investasi yang tepat, serta pengelolaan risiko keuangan. Sementara itu, menurut (Arikunto, 2010), perencanaan keuangan ialah tahap perencanaan kegunaan dana/ Aset keuangan dengan efisien untuk mendapatkan cita-cita finansial yang sudah disusun. Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa perencanaan finansial ialah proses sistematis dan terencana dalam pengelolaan keuangan meraih sasaran finansial periode panjang.

Tujuan utama perencanaan keuangan ialah untuk mengoptimalkan pemakaian kekayaan finansial yang ada serta meminimalkan bahaya keuangan yang mungkin muncul. dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Gitman dan Zutter dalam buku "Principles of Managerial Finance". 4 tahap dalam pengelolaan keuangan di desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu metode atau prosedur dalam mengatur keuangan desa. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam merencanakan keuangan desa. ((Agung Nur Probohudono, 2019); (Hanif Muzaqi et al., 2022); (Meirinaldi & Fitriansyah, 2023):

1. Mengidentifikasi Sumber Pendanaan Desa:

- a) Mengidentifikasi berbagai sumber pendanaan yang tersedia bagi desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sumber-sumber lainnya.
- b) Memahami peraturan dan ketentuan terkait penggunaan masing-masing sumber pendanaan.

2. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

- a) Menyusun anggaran pendapatan yang terdiri dari proyeksi penerimaan dari berbagai sumber.

- b) Menyusun anggaran belanja untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa.
- c) Memastikan kesesuaian antara rencana anggaran dengan prioritas dan kebutuhan desa.

3. Menetapkan Skala Prioritas Penggunaan Anggaran

- a) Menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama untuk dibiayai berdasarkan kebutuhan dan dampaknya bagi masyarakat desa.
- b) Mengalokasikan anggaran secara proporsional sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.

4. Menyusun Rencana Realisasi Anggaran

- a) Menyusun rencana realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran secara periodik (bulanan, triwulanan, dan tahunan).
- b) Mengidentifikasi potensi risiko dan kendala dalam realisasi anggaran serta merencanakan langkah mitigasinya.-Perencanaan keuangan dana desa yang bagus gimana atau ada aturannya melibatkan siapa saja menurut buku manajemen keuangan

Menurut buku petunjuk teknis operasional perencanaan keuangan desa tahun 2021 : - temuan

NO	TEKNIK OPERASIONAL	KETERANGAN
1	Pengumpulan Dokumen	Pengumpulan Dokumen yang ada di Desa Pemerihan sudah optimal.
2	Pencermatan RKP Desa	Pencermatan RKP Desa yang sudah ada di Desa Pemerihan sudah optimal.
3	Penyusunan Dokumen APB Desa	Penyusunan Dokumen APB desa yang sudah ada sudah Optimal

4	Musyawarah BPD	Musyawarah BPD masih kurang optimal karena musyawarah hanya melibatkan beberapa orang tidak melibatkan Masyarakat
5	Evaluasi APB Desa	Evaluasi APB Desa yang sudah ada di Desa Pemerihan sudah optimal
6	Penetapan & Penyampaian Informasi	Penetapan dan Penyampaian Informasi penetapannya sudah optimal sedangkan penyampain informasinya masih kurang tidak disampaikan kemasyarakat

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada Desa Pemerihan di Kabupaten Pesisir Barat. Pemilihan Desa Pemerihan sebagai objek penelitian sangat menarik karena memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana desa, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam perencanaan keuangannya, terutama dalam mengoptimalkan potensi sektor wisata dan kelautan. Selain itu, karakteristiknya sebagai desa pesisir menambah kompleksitas dalam perencanaan keuangan, mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang unik sesuai dengan kondisi geografis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola dan masyarakat, serta melalui pengumpulan berbagai dokumen terkait perencanaan keuangan desa, seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan laporan keuangan desa lainnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan proses perencanaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh pengelola dengan ketentuan perencanaan keuangan desa menurut pedoman teknis operasional perencanaan keuangan desa tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan dana desa di Desa Pemerihan telah mencapai tingkat yang baik dalam beberapa aspek, seperti pengumpulan dokumen, pemantauan RKP Desa, penyusunan

dokumen APB Desa, dan evaluasi APB Desa. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah BPD dan kurangnya distribusi informasi yang merata kepada seluruh warga desa. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan anggaran pembangunan tahun 2024, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur penting seperti jembatan dan TPU yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, memperbaiki sistem sosialisasi dan transparansi informasi, serta fokus pada pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan warga Desa Pemerihan.

NO	TEKNIK OPERASIONAL	KETERANGAN	TEMUAN
1	Pengumpulan Dokumen	Pengumpulan Dokumen yang ada di Desa Pemerihan sudah optimal.	Pengumpulan dokumen di Desa Pemerihan sudah dilakukan dengan baik dan optimal, menunjukkan adanya sistem yang efektif dalam pengelolaan dokumen.
2	Pencermatan RKP Desa	Pencermatan RKP Desa yang sudah ada di Desa Pemerihan sudah optimal.	Pencermatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa juga telah dilakukan secara optimal, mencerminkan adanya perhatian yang baik terhadap perencanaan pembangunan desa.
3	Penyusunan Dokumen APB Desa	Penyusunan Dokumen APB desa yang sudah ada sudah Optimal	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa sudah optimal, menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran berjalan dengan baik.
4	Musyawarah BPD	Musyawarah BPD masih kurang optimal karena musyawarah hanya melibatkan beberapa orang tidak melibatkan Masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah BPD dengan mengundang lebih banyak warga untuk berpartisipasi.
5	Evaluasi APB Desa	Evaluasi APB Desa yang sudah ada di Desa Pemerihan sudah optimal	Evaluasi terhadap APB Desa yang ada sudah optimal, menunjukkan bahwa ada mekanisme yang baik dalam menilai dan mengevaluasi penggunaan anggaran.
6	Penetapan & Penyampaian Informasi	Penetapan dan Penyampaian Informasi penetapannya sudah optimal sedangkan penyampaian informasinya masih kurang tidak disampaikan kemasyarakat.	Meningkatkan saluran komunikasi untuk penyampaian informasi kepada masyarakat agar mereka lebih terinformasi tentang keputusan dan kegiatan desa.

Pembahasan

Pembahasan mengenai hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan keuangan dana desa di Desa Pemerihan masih memerlukan perbaikan, meskipun beberapa aspek sudah berjalan dengan baik. Keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam musyawarah BPD dan kurangnya sosialisasi informasi menunjukkan masih adanya kelemahan dalam aspek transparansi dan partisipasi dalam perencanaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan temuan Pranata et al. (2024), yang mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di wilayah sekitar belum optimal. Belum terwujudnya pembangunan infrastruktur penting, seperti jembatan dan keterbatasan TPU, menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini membuat masyarakat harus menghadapi risiko dalam aktivitas sehari-hari, seperti menyeberangi sungai untuk mengakses pemakaman. Situasi ini menegaskan perlunya evaluasi ulang terhadap proses penetapan prioritas pembangunan dan peningkatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa agar program yang direncanakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.

Berdasarkan evaluasi perencanaan keuangan di Desa Pemerihan sesuai dengan buku petunjuk teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa tahun 2021, terdapat beberapa aspek yang telah berjalan dengan baik, sementara beberapa lainnya masih memerlukan perbaikan. Dalam hal pengumpulan dokumen, Desa Pemerihan telah menunjukkan kinerja yang optimal, dengan semua dokumen yang diperlukan untuk perencanaan keuangan berhasil dikumpulkan dan terorganisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses analisis RKP Desa juga berjalan baik, di mana staf desa telah melakukan evaluasi dan penelitian dokumen RKP Desa secara menyeluruh dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penyusunan dokumen APB Desa juga telah dilakukan dengan baik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan komponen yang diperlukan sesuai panduan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa staf desa memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur penyusunan APB Desa. Evaluasi APB Desa juga telah dilaksanakan dengan baik, termasuk pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Musyawarah BPD belum berjalan secara optimal akibat terbatasnya partisipasi masyarakat. Musyawarah tersebut hanya melibatkan sejumlah individu

tertentu dan tidak mencakup masyarakat secara luas. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan serta tingkat representasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa. Dalam hal penetapan dan penyampaian informasi, terdapat ketidakseimbangan; sementara proses penetapan sudah berjalan dengan baik, penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum memadai. Informasi mengenai perencanaan keuangan desa tidak disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan keuangan desa, perlu ada perbaikan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dalam musyawarah BPD dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini bisa dicapai dengan meningkatkan sosialisasi, memanfaatkan berbagai media komunikasi, dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan keuangan desa.

KESIMPULAN

Perencanaan keuangan dana desa di Desa Pemerihan telah menunjukkan efektivitas yang baik dalam beberapa aspek seperti pengumpulan dokumen, pencermatan RKP Desa, penyusunan dokumen APB Desa, dan evaluasi APB Desa. Namun, masih terdapat kendala signifikan dalam hal partisipasi masyarakat pada musyawarah BPD yang sangat terbatas dan penyebaran informasi yang belum merata kepada masyarakat. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan anggaran pembangunan tahun 2024, terutama terkait pembangunan infrastruktur penting seperti jembatan dan TPU yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah Desa Pemerihan perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah dengan membuat jadwal pertemuan yang lebih fleksibel dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat. Sistem informasi perlu diperbaiki dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi dan memasang papan informasi di tempat-tempat strategis. Perencanaan pembangunan harus dioptimalkan melalui survei kebutuhan masyarakat secara berkala dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang mendesak. Kapasitas aparatur desa juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan pemahaman tentang transparansi. Terakhir, perlu dibentuk tim pengawas independen dari unsur masyarakat untuk monitoring dan evaluasi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nur Probohudono, I. S. R. (2019). Impact Of Village Financial Implementation On Village Financial Management Accountability. *Jurnal Ekonomi*, 24(1), 111. <https://doi.org/10.24912/Je.v24i1.479>
- Arikunto. (2010). *Metode Penelitian*.
- Elnis Gulo, K., & Molinda Kakisina, S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2(1), 39–43. <https://doi.org/10.56248/Jamane.v2i1.67>
- Fatmasari, D. M., & Adi, P. H. (2021). Perencanaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(02). <https://doi.org/10.29040/Jie.v5i2.2557>
- Hanif Muzaqi, A., Susanto, D., Abror, M. D., & Ambulanto, T. (2022). Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Merespon Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 6(2), 122–144. <https://doi.org/10.25139/Jmnegara.v6i2.4847>
- Meirinaldi, M., & Fitriansyah, A. (2023). The Role Of Village Financial Literacy In Village Fund Management In Pringapus Village, Semarang District. *Proceedings Of The 3rd Multidisciplinary International Conference, Mic 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/Eai.28-10-2023.2341785>
- Monalisa Siagian, S., Br. Ginting, B., & Hanafi Purba, N. (2024). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tapian Nauli. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 841–845. <https://doi.org/10.55338/Saintek.v5i3.2832>
- Novitasari Ye, Sopanah, & Anggarani. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Conference On Economic And Business Innovation (Cebi)*, Vol. 2 No. 1 (1598–1609).
- Ranti Nurdiansari. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 27–34. <https://doi.org/10.52005/Aktiva.v2i1.51>
- Susanti, V., Rizal, S., Indrayenti, I., Khairudin, K., & Haninun, H. (2020). Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal*

Akuntansi Dan Keuangan, 11(2), 70.
<https://doi.org/10.36448/Jak.v11i2.1525>

Syafa Abhinaya Putri, Intan Rizki Ainun Nisa, Felanti Wulandari, Naviza Virda Uci, Meylin Indah Nawang Wulan, Fabella Jihan Salma, & Silvina Yusapti Sehatatina. (2024). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(4), 50–58. <https://doi.org/10.61132/Jepi.v2i4.937>

Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1). <https://doi.org/10.18202/Jamal.2018.04.9009>

Wulandari, F. A., & Sutjiati, R. (2014). Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Perencanaan Keuangan Keluarga Terhadap Kesejahteraan (Studi Pada Warga Komplek Bcp, Jatinangor). *Jurnal Siasat Bisnis*, 18(1), 21–31. <https://doi.org/10.20885/Jsbs.Vol18.Iss1.Art3>

Yusuf, Abdullah, & Hasan. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 2.